



PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
(SKKAAD)

URUSAN PERTANIAN,
URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
URUSAN PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF,
URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA,
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
URUSAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
URUSAN PERPUSTAKAAN,
URUSAN KESEHATAN
URUSAN SOSIAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN PERTANIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PENANGGULANGAN BENCANA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PERPUSTAKAAN, KESEHATAN DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Urusan Pertanian, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanggulangan Bencana, Komunikasi Dan Informatika, Pembangunan Daerah Tertinggal, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Perpustakaan, Kesehatan Dan Sosial Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun

2011 tentang Penyusunan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, (Lembar Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN PERTANIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PENANGGULANGAN BENCANA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PERPUSTAKAAN, KESEHATAN, DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang kearsipan.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
11. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan,/ atau lembaga kearsipan.
13. Arsiparis adalah Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
14. Pencipta Arsip adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang

- mempunyai tugas pokok, dan tanggung jawab mengolah seluruh arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab mengelola seluruh arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten dan melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di lingkungannya.
 17. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (Sepuluh) tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
 18. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
 19. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
 20. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
 21. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan kerahasiaan informasi arsip yang berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
 22. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
 23. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
 24. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
 25. Sangat rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau keselamatan bangsa.
 26. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ atau ketertiban umum.
 27. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

- mempunyai tugas pokok, dan tanggung jawab mengolah seluruh arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab mengelola seluruh arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten dan melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di lingkungannya.
 17. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (Sepuluh) tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
 18. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
 19. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
 20. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
 21. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan kerahasiaan informasi arsip yang berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
 22. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
 23. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
 24. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
 25. Sangat rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau keselamatan bangsa.
 26. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ atau ketertiban umum.
 27. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

mempunyai tugas pokok, dan tanggung jawab mengolah seluruh arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

16. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab mengelola seluruh arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten dan melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di lingkungannya.
17. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (Sepuluh) tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
18. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
19. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
20. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
21. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan kerahasiaan informasi arsip yang berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
22. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
23. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
24. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
25. Sangat rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau keselamatan bangsa.
26. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ atau ketertiban umum.
27. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

28. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
29. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
30. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik fisik arsip maupun informasinya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penggunaan Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. Tersedianya pedoman penggunaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Terselenggaranya pelayanan penggunaan arsip secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Pengamanan Arsip Dinamis, serta Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis.

BAB II

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Pasal 4

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.
- b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda

dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.

- c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- d. Setiap pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten hanya dapat mengakses rsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 5

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

- a. Arsip dinamis di Lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten, meliputi :
 - Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi Bagian Tata Pemerintah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerja sama.
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam.
 - Asisten Administrasi Umum yang membawahi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan Keuangan.
- b. Arsip dinamis dari lingkungan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
- c. Arsip dinamis dari Perangkat Daerah Kabupaten lainnya.

Pasal 6

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu :

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan, rekam medis pegawai.
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Unit Layanan Pengadaan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten.

- c. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen.
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja, dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi urusan kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 7

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten :

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Hukum Sekertariat Daerah seperti kasus/sengketa hukum, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari Bagian Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan dokumen lainnya.

Pasal 8

Penetapan tingkat klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengamanan Arsip Dinamis

Pasal 9

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada *filing cabinet* dan arsip kategori rahasia disimpan pada lemari besi.

Pasal 10

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan an Pengelola Arsip Aktif di *Central File* masing-masing Unit Pengolah.

- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *Central File* dan/atau di *Recrod Center*.

Pasal 11

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip

Pasal 12

- (1) Klasifikasi Keamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman dalam pengaturan akses arsip dinamis.
- (2) Pengaturan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pengaturan akses arsip aktif dan arsip inaktif dengan retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, dimuat dalam Standard Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah Provinsi masing-masing, dan
 - b. Pengaturan akses arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (Sepuluh) tahun dimuat dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pengamanan fisik Arsip dan informasi Arsip Dinamis

Pasal 13

- (1) Pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi.
- (2) Pengamanan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan media arsip.

- (3) Pengamanan fisik arsip dan informasi arsip dinamis diuraikan sebagai mana tercantum pada tabel 1.

Bagian Kelima

Penyampaian fisik Arsip dan Informasi Arsip Dinamis

Pasal 14

- (1) Penyampaian fisik Arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi.
- (2) Penyampaian fisik Arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi.
- (3) Penyampaian fisik arsip dan informasi arsip dinamis diuraikan sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Bagian Keenam

Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Pasal 15

- (1) Pengguna yang berhak di lingkungan instansi meliputi :
 - a. Penentu kebijakan adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah.
 - b. Pelaksana Kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa.
 - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip ada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal.
- (2) Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi meliputi :
 - a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/ terbuka.
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal;
 - c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani.
 - d. Penggolongan hak akses arsip dinamis diuraikan sebagai mana tercantum dalam tabel 3.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal
BUPATI SUBANG,



Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Desember 2021
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 80 91

Lampiran I : Peraturan Bupati Subang
 Nomor : 91 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 DESEMBER 2021
 Tentang : Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Urusan Pertanian, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanggulangan Bencana, Komunikasi Dan Informatika, Pembangunan Daerah Tertinggal, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Perpustakaan, Kesehatan, Dan Sosial Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

Tabel 1 Pengamanan Arsip Dinamis Sesuai dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

| TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN | MEDIA ARSIP | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| | ARSIP KONVENSIONAL | | | ARSIP ELEKTRONIK | | |
| | Arsip | Pengguna | Prasarana & Sarana | Arsip | Pengguna | Prasarana & Sarana |
| Biasa/ Terbuka | Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus | Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses | Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus | <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip | Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses | Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus |
| Terbatas | Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip | Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Diperlukan tempat penyimpanan yang aman | 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internet atau oleh pihak- pihak eksternal | 1. Autentifikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual | 1. Autentifikasi Server 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus 3. <i>Firewall</i> dan sistem sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--|--|---|
| Rahasia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" Pada fisik arsip 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia | Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan penegak hukum | Lokasi aman dengan akses yang terbatas | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internet atau oleh pihak-pihak eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya staf yang ditunjuk oleh organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut 2. Autentifikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital) 3. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual | <ol style="list-style-type: none"> 1. Autentifikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus 3. <i>Firewall</i> dan sistem sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita |
| Sangat Rahasia | | Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan dan penegak hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses 2. Penerapan kebijakan "Meja harus bersih" | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internet atau oleh pihak-pihak eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Autentifikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital) 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual | <ol style="list-style-type: none"> 1. Autentifikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus 3. <i>Firewall</i> dan sistem sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi |

Tabel 2. Prosedur Pengiriman Informasi Arsip Dinamis

| NO. | TINGKAT/ DRAJAT KLASIFIKASI | ARSIP KONVENSIONAL | ARSIP ELEKTRONIK |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1. | Biasa/ Terbuka | Tidak ada persyaratan prosedur khusus | Tidak ada prosedur khusus |
| 2. | Terbatas | Amplop segel | Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain-lain |
| 3. | Rahasia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan warna kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia 3. Menggunakan amplop dobel 4. Amplop segel, stempel rahasia 5. Konfirmasi tanda terima 6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi. |
| 4. | Sangat Rahasia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan warna kertas yang berbeda. 2. Menggunakan amplop dobel bersegel 3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tanda tangan). 4. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi. 4. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email. |

Tabel 3 : Pengguna yang berhak akses arsip dinamis

| Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses | Penentu Kebijakan | Pelaksana Kebijakan | Pengawas Internal/ Eksternal | Publik | Penegak Hukum |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------|------------------|
| Biasa/Terbuka | V | V | V | V | V |
| Terbatas | V | - | V | - | V |
| Rahasia | V | - | V | - | V |
| Sangat Rahasia | V | - | V | - | V |

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 91 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 DESEMBER 2021

TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN : PERTANIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PENANGGULANGAN BENCANA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PERPUSTAKAAN, KESEHATAN DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP | | | | KLASIFIKASI KEAMANAN | | | | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|-----|------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--|----------------------|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | SR | R | T | B | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | PT | URUSAN PERTANIAN | | | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| | PT | 01 | PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | | | |
| | PT | 01 | 01 | Perbibitan Ternak | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Produksi Bibit Ternak Unggas | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | 04 | Produksi Bibit Aneka Ternak | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penilaian Bibit ternak | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Pelepasan Bibit ternak | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Sertifikasi Bibit Ternak | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pengawasan Mutu Bibit Ternak | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | | | | 09 | Analisis Pengembangan Bibit Ternak | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 10 | Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 11 | Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 01 | 02 | Pakan Ternak | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Bahan Pakan Asal Hewan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Bahan Pakan Asal Tumbuhan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Budidaya Pakan Hijauan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Kawasan Penggembalaan dan | | | √ | | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | Integrasi Ternak | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 05 | Produksi Pakan Olahan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pengolahan Pakan Olahan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Sertifikasi Pakan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Pengawasan Pakan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 01 | 03 | Budidaya Ternak | | | | | | | |
| | | | 01 | Ternak Sapi dan Kerbau Potong | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Ternak Kambing dan Domba Potong | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Ternak Sapi dan Kerbau Perah | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | 04 | Ternak Kambing Perah | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Ternak Unggas | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Aneka Ternak dan Monogastrik | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Sarjana Membangun Desa (SMD) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 01 | 04 | Kesehatan Hewan | | | | | | | |
| | | | 01 | Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Penyidikan Penyakit Hewan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 03 | Pencegahan Penyakit Hewan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Pemberantasan Penyakit Hewan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Perlindungan Hewan dengan Analisis Risiko Penyakit Eksotik | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Perlindungan Hewan dengan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Kelembagaan Kesehatan Hewan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Sumber Daya Kesehatan Hewan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Laporan THL | | | √ | | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | | 10 | Proposal Poskeswan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 11 | Mutu Obat Hewan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 12 | Peredaran Obat Hewan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 13 | Pendaftaran Obat Hewan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 14 | Rekomendasi Obat Hewan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 01 | 05 | Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen | | | | | | | |
| | | | | 01 | Teknologi Pascapanen | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | 02 | Sarana Pascapanen | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Penerapan Higiene Sanitasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Inspeksi Higiene Sanitasi | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pengawasan Sanitasi | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Pengawasan Keamanan Produk Hewan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Zoonosis | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 08 | Kesejahteraan Hewan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Pengujian Produk Hewan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 10 | Sertifikasi Produk Hewan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 11 | Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 02 | PERKEBUNAN | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------------|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------|
| | PT | 02 | 01 | Tanaman Semusim | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pemberdayaan Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Kelembagaan Tanaman Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 02 | 02 | Tanaman Rempah & Penyegar | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
|--|----|----|----|-----------------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|
| | | | | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Penyiapan PerbenihanTanaman Rempah & Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Rempah & Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 02 | 03 | Tanaman Tahunan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
|--|----|----|----|-------------------------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|
| | | | | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pemberdayaan Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Kelembagaan Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 02 | 04 | Perlindungan Perkebunan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 02 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Dampak Perubahan Iklim | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pencegahan Kebakaran | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 02 | 05 | Pascapanen dan Pembinaan Usaha | | | | | | | |
| | | | | 01 | Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------|---------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | | | | 02 | Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Bimbingan Usaha Perkebunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Bimbingan Perkebunan Berkelanjutan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Gangguan Usaha | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Penanganan Konflik | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 03 | HORTIKULTURA | | | | | | | | | |
| | PT | 03 | 01 | Perlindungan hortikultura | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Teknologi Perlindungan Tanaman Buah | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | 03 | Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 04 | Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 05 | Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 06 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 07 | Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 08 | Informasi dan Persyaratan Teknis | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | PT | 03 | 02 | Perbenihan Hortikultura | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 02 | Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 03 | Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 09 | Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 04 | PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | |
| | PT | 04 | 01 | Perluasan dan Pengelolaan Lahan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Identifikasi Lahan untuk Basis Data Lahan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 02 | Analisis dan Penyajian Data Lahan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Identifikasi dan Analisis Penguadalian Lahan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Rekomendasi Teknis pengendalian lahan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Identifikasi dan Analisis perluasan | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | | 10 | Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 04 | 02 | Pengelolaan Air Irigasi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengembangan Sumber Air Permukaan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengembangan Sumber Air Tanah | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan Jaringan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Optimasi Air | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Iklim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Konservasi Air dan Lingkungan Hidup | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Identifikasi Kelembagaan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pengembangan Kelembagaan | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | PT | 04 | 03 | Pembiayaan Pertanian | | | | | | | |
| | | | | 01 | Data dan Informasi pembiayaan program | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pembiayaan Syariah | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Kerja Sama Pembiayaan Syariah | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Kelembagaan Agribisnis | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | | 08 | Pemberdayaan Agribisnis | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 04 | 04 | Pupuk Pestisida | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Tanaman Pangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Hortikultura dan Perkebunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pupuk Anorganik Tanaman Pangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pupuk Anorganik Hortikultura dan Perkebunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pestisida Kimia | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Pestisida Hayati | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pengawasan Pupuk | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pengawasan Pestisida | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 04 | 05 | Alat dan Mesin Pertanian | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----------------|---|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 01 | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 05 | TANAMAN PANGAN | | | | | | | |
| | PT | 05 | 01 | Perbenihan Tanaman Pangan | | | | | | |
| | | | 01 | Penilaian Varietas | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pengawasan Mutu Benih | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Produksi Benih Serealia Padi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------|----------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 04 | Produksi Benih Serealia Non Padi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Produksi Benih Aneka Kacang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Produksi Benih Umbi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Kelembagaan Produksi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Kelembagaan Pengawasan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 05 | 02 | Budidaya Serealia | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Padi Irigasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Padi Rawa | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Padi Tadah Hujan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Padi Tadah Lahan Kering | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Intensifikasi Jagung | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | merugikan siapapun. | | |
| | | | | 06 | Pengembangan Jagung | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Intensifikasi Serealia Lain | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pengembangan Serealia Lain | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 05 | 03 | Budidaya Aneka Kacang dan Umbi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Intensifikasi Kedelai | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengembangan Kedelai | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Intensifikasi Ubi Kayu | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pengembangan Ubi Kayu | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Intensifikasi Aneka Kacang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Pengembangan Aneka Kacang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Intensifikasi Aneka Umbi | | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pengembangan Aneka Umbi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 05 | 04 | Perlindungan Tanaman Pangan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Adaptasi Dampak Perubahan Iklim | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Mitigasi dampak perubahan iklim | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Identifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | analisis mengenai dampak lingkungan | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | PT | 05 | 05 | Pascapanen Tanaman Pangan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Teknologi pascapanen padi. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Sarana pascapanen padi. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Sarana pascapanen jagung dan sereal lain. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Teknologi pascapanen aneka umbi. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Sarana pascapanen aneka umbi. | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 06 | PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN | | | | | | | | |
| | PT | 06 | 01 | Pengolahan Hasil Pertanian | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 01 | Tanaman Pangan Serelia | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Tanaman Pangan Aneka Kacang dan Aneka Umbi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Tanaman Buah dan Sayuran | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Tanaman Perkebunan Semusim | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Tanaman Perkebunan Tahunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Peternakan Ruminansia | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Peternakan Non Ruminansia | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 06 | 02 | Mutu dan Standarisasi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Standarisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Standarisasi Perkebunan dan Peternakan | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | 03 | Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Perkebunan dan Peternakan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Akreditasi dan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 06 | Akreditasi dan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 07 | Kerjasama dan Harmonisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 08 | Kerjasama dan Harmonisasi Perkebunan dan Peternakan | | | √ | | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | PT | 06 | 03 | Pengembangan Usaha dan Investasi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Kemitraan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Investasi Perkebunan dan Peternakan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Daya Saing Promosi Dalam Negeri | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Eksibisi dan Ekspo Promosi Dalam Negeri | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 07 | Daya Saing Promosi Luar Negeri | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Eksibisi dan Ekspo Promosi Luar Negeri | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 06 | 04 | Pemasaran Domestik | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Analisis Informasi Pasar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Deseminasi Informasi Pasar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pemantauan Pasar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Stabilisasi Harga | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Sarana Pasar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Kelembagaan Pasar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Akses Pasar untuk Jaringan Pemasaran | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Sarana Pemasaran untuk Jaringan Pemasaran | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | PT | 06 | 05 | Pemasaran Internasional | | | | | | | |
| | | | | 01 | Analisis Ekspor | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengembangan Ekspor | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pemasaran Bilateral | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pemasaran Regional | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pemasaran Multilateral | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Kerjasama Komoditi Regional | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | PT | 07 | PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN | | | | | | | | |
| | PT | 07 | 01 | Administrasi | | | | | | | |
| | | | | 01 Rencana Kerja | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 TOR/ Proposal | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 Pembentukan Tim Kerja | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 Surat menyurat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 07 | 02 | Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan | | | | | | | |
| | | | | 01 Hasil Penelitian dan Pengembangan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | PT | 07 | 03 | Diseminasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 07 | 04 | Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 07 | 05 | Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 07 | 06 | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 07 | 07 | Data Penelitian dan Pengembangan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 07 | 08 | Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | merugikan siapapun. | |
| | PT | 08 | HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) | | | | | | | |
| | PT | 08 | 01 | Hak Cipta | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 02 | Hak Paten Sederhana | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 03 | Hak Paten Biasa | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 04 | Hak Merek | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 05 | Pendaftaran Varietas Tanaman | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 06 | Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 07 | Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 08 | Permohonan HKI yang ditolak | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 09 | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 08 | 10 | Data Penelitian dan Pengembangan | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan | |
| PT | 09 | KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | |
| PT | 09 | 01 | Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | | | | | | | | |
| | | | 01 | Analisis Ketersediaan Pangan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Sumberdaya Pangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Analisis Akses Pangan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Pengembangan Akses Pangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Analisis Kerawanan Pangan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 06 | Penanggulangan Kerawanan Pangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 09 | 02 | Distribusi dan Cadangan Pangan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Analisis Distribusi Pangan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Kelembagaan Distribusi Pangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Analisis Harga Pangan Produsen | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Analisis Harga Pangan Konsumen | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | | | | 05 | Cadangan Pangan Pemerintah | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Cadangan Pangan Masyarakat | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 09 | 03 | Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pola Konsumsi Pangan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Kebutuhan Konsumsi Pangan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan Pangan Lokal | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Promosi Penganekaragaman Pangan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pengawasan Keamanan Pangan | | | √ | | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|---------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Segar | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 06 | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 09 | 04 | Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan | | | | | | | |
| | | | 01 | Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Dewan Ketahanan Pangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | SOLID | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Penghargaan Ketahanan Pangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 10 | KARANTINA PERTANIAN | | | | | | | | |
| | PT | 10 | 01 | Data karantina Hewan | | | | | | | |
| | | | 01 | Data Penyakit Hewan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Teknik dan Metode | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Data Kualitatif dan Kuantitatif | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 04 | Data Sarana/Laboratorium/Lokasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Laporan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 10 | 02 | Data Karantina Tumbuhan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Data Penyakit Tumbuhan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Teknik dan Metode | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Data Kualitatif dan Kuantitatif | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Data Sarana/Laboratorium/Lokasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Laporan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 10 | 03 | Inventarisasi Penyakit Hewan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Survei | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Determinasi Penyakit/Daerah Pencar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengamatan Penyakit di | | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | laboratorium/kandang uji diagnosa | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | PT | 10 | 04 | Inventarisasi Penyakit Tumbuhan | | | | | | | |
| | | | | 01 Survei | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 Determinasi Penyakit/Daerah Pencar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 Pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 10 | 05 | Tindakan Karantina Hewan | | | | | | | |
| | | | | 01 Pemeriksaan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 Pengasingan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 Pengamatan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 Perlakuan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 Penahanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 Penolakan | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------------|-------------|--|--|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan | |
| | | | | 07 | Pemusnahan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pembebasan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 10 | 06 | Tindakan Karantina Tumbuhan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pemeriksaan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengasingan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengamatan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Perlakuan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penahanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Penolakan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pemusnahan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pembebasan | | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan | |
| | PT | 10 | 07 | Sertifikasi Pelepasan Karantina | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 10 | 08 | Pemberantasan Penyakit Hewan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penutupan Satu Daerah | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pembatasan Gerak HPHK | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pembinaan HPHK | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------------------|---|--|--|--|-------|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | | | |
| | PT | 10 | 09 | Pemberantasan Penyakit Tumbuhan | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penutupan Satu Daerah | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pembatasan Gerak OPHK | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pembinaan OPHK | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 10 | 10 | Keamanan Pangan | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan) | | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) | | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| PT | 10 | 11 | Tertib Operasional Karantina Hewan | | | | | | | | |
| | | | 01 | Penelitian Data Laporan Operasional | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| PT | 10 | 12 | Tertib Operasional Karantina Tumbuhan | | | | | | | | |
| | | | 01 | Penelitian Data Laporan Operasional | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| PT | 11 | PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN | | | | | | | | | |
| PT | 11 | 01 | Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman | | | | | | | | |
| | | | 01 | Permohonan Perlindungan Varietas Tananm | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pengujian Perlindungan Varietas Tananm | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| PT | 11 | 02 | Pelayanan Perijinan Pertanian | | | | | | | | |
| | | | 01 | Sarana I (bidang pupuk, pestisida, | | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----------------------|
| | | | | alat dan mesin pertanian) | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 02 | Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuh, teknis pengalihan saham perkebunan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 11 | 03 | Pelayanan Hukum | | | | | | | |
| | | | 01 | Sertifikasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pertimbangan Hukum | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 12 | BIMBINGAN TEKNIS | | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PT | 13 | EVALUASI | | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| 2. | KM | KOPERASI DAN UMKM | | | | | | | | | |
| | KM | 01 | KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|--|
| | KM | 01 | 01 | Organisasi dan Badan Hukum Koperasi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Organisasi Koperasi dan UKM | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 02 | Badan Hukum Koperasi (Penatausahaan badan hukum koperasi, Evaluasi Badan Hukum Koperasi) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 03 | Penelaahan Kasus Hukum (Kasus hukum Koperasi, kasus hukum UKM) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | KM | 01 | 02 | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 02 | Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan UKM | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 03 | Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan (Produk peraturan Perundang-undangan Pusat, Peraturan Daerah) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | KM | 01 | 03 | Tata Laksana Koperasi dan UKM | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Tata Laksana Koperasi (Tata Laksana Koperasi Primer, Tata aksana Koperasi Sekunder) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 02 | Tata Laksana UKM (Tata laksana Usaha Kecil, Tata Laksana Usaha Menengah) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | | 03 | Klasifikasi Koperasi dan UKM | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----------|---|--|--|--|--|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan | |
| | KM | 01 | 04 | Keanggotaan Koperasi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Partisipasi Usaha dan Permodalan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Partisipasi Pengawasan (Rapat Anggota, Pengawasan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan Anggota Kaderisasi, Penyuluhan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 01 | 05 | Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengendalian (pengendalian intern, tindak lanjut hasil pengendalian) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Akuntabilitas dan Akuntansi (Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM | | | | | | | |
| | | | | | - Monitoring | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | | - Evaluasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 02 | PRODUKSI | | | | | | | | | |
| | KM | 02 | 01 | Pertanian Tanaman Pangan dan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Hortikultura | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Tanaman Pangan Padi, Palawija | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Hortikultura (Buah-buahan dan Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Sayur) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Sarana (Sarana produksi, Sarana Pengolahan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 02 | 02 | Kehutanan dan Perkebunan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Kehutanan (Hutan Produksi, Hutan Kemasyarakatan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Perkebunan (Tanaman semusim dan rempah-rempah, Tanaman keras) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Sarana (Sarana produksi, Sarana Pengolahan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 02 | 03 | Perikanan dan Peternakan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Peternakan (Ternak besar, Ternak Kecil) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 02 | 04 | Industri, Kerajinan dan Pertambangan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri (Sandang, Logam dan | | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Elektronik, Pangan, Kimia dan Aneka) | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 02 | Kerajinan (Logam , Non Logam) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pertambangan Umum dan Migas) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 02 | 05 | Ketenagalistrikan dan aneka usaha | | | | | | | |
| | | | 01 | Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha (Listrik, Konstruksi) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Aneka Usaha (Jasa Umum , Angkutan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 03 | PEMBIAYAAN | | | | | | | | |
| | KM | 03 | 01 | Program Pendanaan | | | | | | | |
| | | | 01 | Program Pendanaan Jangka Pendek (Koperasi dan UKM Jangka pendek) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | merugikan siapapun. | |
| | KM | 03 | 02 | Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengembangan dan Pengendalian KSP | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan dan Pengendalian USP LKM | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 03 | 03 | Urusan Permodalan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengembangan Permodalan Sendiri (Koperasi dan UKM) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengembangan Permodalan Luar (Permodalan Bank, Non Bank) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan Kredit Program (Bank, Non Bank) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 03 | 04 | Asuransi dan Jasa Keuangan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Asuransi (Koperasi, UKM) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Perpajakan (Koperasi, UKM) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | 03 | Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (Bank dan Non Komersial Bank) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| KM | 03 | 05 | Pembiayaan dan Penjaminan Kredit | | | | | | | |
| | | | 01 | Lembaga Pembiayaan (Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Penjaminan Kredit (Penjaminan, Asuransi Kredit) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pasar Modal (Obligasi, Modal Penyertaan) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| KM | 03 | 06 | Lembaga Pengelola dan Bergulir KUKM (LPDB) | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
|--|----|----|------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | KM | 04 | PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA | | | | | | | | |
| | KM | 04 | 01 | Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengadaan Sektor Formal dan informal | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Distribusi Sektor Formal dan Informal | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan Sektor formal dan in formal | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 04 | 02 | Ekspor dan Impor | | | | | | | |
| | | | | 01 | Ekspor (Koperasi dan UKM) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Impor (Koperasi dan UKM) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Hubungan Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral, Regional dan Bilateral) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 04 | 03 | Sarana dan Prasarana Pemasaran | | | | | | | |
| | | | | 01 | Sarana (Pengembangan Pasar Tradisional dan Sentra | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Pemasaran) | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | 02 | Prasarana (Lembaga Perantara dan Fasilitasi HAKI) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pengembangan Potensi Pemasaran (Koperasi dan UKM) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 04 | 04 | Kemitraan dan Jaringan Usaha | | | | | | | |
| | | | 01 | Kemitraan Koperasi dan UKM | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Jaringan Usaha (Usaha Koperasi dan UKM) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Koperasi dan UKM | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 04 | 05 | Informasi dan Publikasi Bisnis | | | | | | | |
| | | | 01 | Pengumpulan Informasi Koperasi dan UKM | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pengolahan informasi Koperasi dan UKM | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Publikasi dan Informasi (Koperasi dan UKM) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 04 | 06 | Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan UKM | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| KM | 05 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | |
| KM | 05 | 01 | Pengembangan Kewirausahaan | | | | | | | | |
| | | | 01 | Lembaga Kewirausahaan (Pengembangan Jaringan kewirausahaan dan Peningkatan Sumber daya Kewirausahaan) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Penumbuhan Kewirausahaan (Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan dan Evaluasi Kewirausahaan) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Sosialisasi Kewirausahaan (Perangkat Lunak dan Promosi Kewirausahaan) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| KM | 05 | 02 | Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM | | | | | | | | |
| | | | 01 | Diklat Formal dan Informal | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Diklat Non Formal (Perangkat Lunak , Sarana dan Prasarana) | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 03 | Kerjasama Lembaga Diklat (Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah) | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 05 | 03 | Peran Serta Masyarakat | | | | | | | |
| | | | 01 | Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Peningkatan Dukungan LSM terhadap KUKM | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 05 | 04 | Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM | | | | | | | |
| | | | 01 | Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 03 | Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (Pemerintah dan Non Pemerintah) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 05 | 05 | Advokasi | | | | | | | |
| | | | | 01 | Advokasi Organisasi dan Manajemen | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Advokasi Kemitraan dan Teknologi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Advokasi Peraturan Perundang-undangan (Kajian penerangan dan Sosialisasi Perundang-undangan) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 06 | PENGKAJIAN SUMBER DAYA UKMK | | | | | | | | |
| | KM | 06 | 01 | Penelitian Koperasi | | | | | | | |
| | | | | 01 | Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Penyelenggaraan Kelembagaan (Koperasi dan Bisnis Koperasi) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 03 | Tatalaksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 06 | 02 | Penelitian UKM | | | | | | | |
| | | | 01 | Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Penyelenggaraan Kelembagaan (Koperasi dan Bisnis Koperasi) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Tatalaksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 06 | 03 | Penelitian Sumberdaya | | | | | | | |
| | | | 01 | Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Penyelenggaraan Kelembagaan (Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Tatalaksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 06 | 04 | Pengembangan Perkaderan UKM | | | | | | | |
| | | | 01 | Penyuluhan (Penyelenggara dan Materi Penyuluhan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----------------------|
| | | | | 02 | Perkaderan (Penilaian dan Pengembangan) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Kerjasama Jaringan lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KM | 06 | 05 | Kerjasama Internasional dan Hubungan antar Lembaga | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| 3- | PM | URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| | PM | 01 | PERENCANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | |
| | PM | 01 | 01 | Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Kelautan, Perikanan dan Peternakan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Energi Terbarukan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 04 | Energi Tak Terbarukan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Sumber Daya Mineral Logam | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Sumber Daya Mineral Non Logam | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 01 | 02 | Perencanaan Industri Manufaktur | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Logam dan Mesin | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 02 | Industri Tekstil dan Aneka | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Kimia Dasar | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Industri Barang Kimia dan Farmasi | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Industri Alat Transportasi | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 06 | Industri Telematika | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 01 | 03 | Perencanaan Jasa dan Kawasan | | | | | | | |
| | | | 01 | Jasa Perdagangan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Jasa Pariwisata | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kawasan Ekonomi | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Kawasan Ekonomi Khusus | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Kawasan Ekonomi Lainnya | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 01 | 04 | Perencanaan Infrastruktur | | | | | | | |
| | | | 01 | Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Infrastruktur Jalan dan Jembatan | | | √ | | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 03 | Infrastruktur Energi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Infrastruktur Sumber Daya Air | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Infrastruktur Transportasi Laut | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 02 | PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| | PM | 02 | 01 | Deregulasi Penanaman Modal | | | | | | | |
| | | | 01 | Sektor Primer Pertanian, Kelautan dan Perikanan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
|--|--|--|----|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | 02 | Sektor Primer Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Sektor Sekunder Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Sektor Tersier Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | | |
| | | | | 06 | Sektor Tersier Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya | | √ | | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 02 | 02 | Pengembangan Peluang Potensi Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Sektor Primer | | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Sektor Tersier | | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika | | √ | | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | | |
| | | | | 04 | Sektor Sekunder Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka | | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 02 | 03 | Pemberdayaan Usaha | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pembinaan | | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Penyuluhan | | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Sektor Primer dan Tersier | | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Sektor Sekunder | | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 05 | Pelayanan Usaha Sektor Primer dan Tersier | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pelayanan Usaha Sektor Sekunder | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Workshop dan Sosialisasi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 03 | PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | PM | 03 | 01 | Pengembangan Promosi | | | | | | |
| | | | 01 | Analisis Target Strategi Promosi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Analisis Strategi Daya Saing Promosi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Fasilitasi Promosi Wilayah Pasifik dan Afrika | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Fasilitasi Promosi Wilayah Jawa Barat | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 03 | 02 | Promosi Sektoral | | | | | | |
| | | | 01 | Promosi Industri Sumber Daya Alam | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | 03 | Industri Manufaktur Lainnya | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Promosi Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Promosi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 03 | 03 | Fasilitasi Promosi Wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten | | | | | | |
| | PM | 03 | 04 | Pameran dan Sarana Promosi | | | | | | |
| | | | 01 | Pameran Dalam Penyusunan Program dan Monitoring | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pameran Dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Media Cetak | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Materi Promosi Media Cetak | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 05 | Publikasi dan Distribusi Media cetak | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pameran Luar Negeri Publikasi dan Distribusi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Materi Promosi Media Elektronik | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Pelayanan Informasi Media Elektronik | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 04 | KERJA SAMA PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| | PM | 04 | 01 | Kerja Sama Bilateral dan Multilateral | | | | | | | |
| | | | 01 | Kerja Wilayah Amerika | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Kerja Sama Wilayah Eropa | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 03 | Kerja Sama Wilayah Asia | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Kerja Sama Wilayah Pasifik dan Afrika | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Kerja Sama Organisasi PBB | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Kerja Sama Organisasi Non PBB | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 04 | 02 | Kerja Sama Regional ASEAN | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | 01 | Kerja Sama ASEAN | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Kerja Sama Sub Regional ASEAN | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia | | | | | | | |
| | | | | 04 | Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Kerja Sama APEC | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 06 | Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 04 | 03 | Kerja Sama Dunia Usaha Internasional | | | | | | | |
| | | | 01 | Asosiasi Bisnis | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Lembaga Bisnis | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Lembaga Perbankan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Lembaga Non Perbankan | | | √ | | Penentu | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|---------------------------|--------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | pelaksana urusan |
| | PM | 05 | PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| | PM | 05 | 01 | Pelayanan Aplikasi | | | | | | | |
| | | | | 01 | Aplikasi Baru Sektor Primer dan Tersier | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Aplikasi Perluasan Sektor Primer dan Tersier | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Aplikasi Perubahan Sektor Primer dan Tersier | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|------------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 04 | Aplikasi Baru Sektor Sekunder | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Aplikasi Perluasan Sektor Sekunder | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Aplikasi Perubahan Sektor Sekunder | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Aplikasi Sektor Tersier | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Pengolahan Data Penanaman Modal | | | √ | | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| | | | | 09 | Laporan PMPTSP | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 05 | 02 | Pelayanan Perizinan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Perizinan Sektor Primer dan Tersier Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Perizinan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Perizinan Sektor Primer dan Tersier Pertambangan dan Energi, | | | √ | | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | Pertambangan dan Aneka Jasa | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| | | | 04 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Verifikasi/Validasi | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|------------------------|--|---|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 08 | Pertimbangan Teknis | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Tim Teknis | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 10 | Penerbitan Naskah Izin | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 11 | BKPRD | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|--|--|--|--|-------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | | |
| | | | 03 | Pelayanan Fasilitas | | | | | | | | |
| | | | 01 | Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pelayanan Sektor Sektor Primer dan Tersier Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam | | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|---|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 05 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia | | √ | | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka | | √ | | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PM | 06 | PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | |
| | PM | 06 | 01 | BAP Pemantauan Penanaman Modal | | √ | | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Laporan Triwulan/Semester Pemantauan Penanaman Modal | | √ | | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 03 | Helpdesk Pemantauan Penanaman Modal | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal dan PTSP | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Saksi Fasilitasi Penyelesaian PMPTSP | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pembelaan Fasilitasi Penyelesaian PMPTSP | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Pemberi Keterangan FSP | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | 08 | Analisis PMPTSP | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | 09 | Pengawasan Penanaman Modal 5 Tahun Musnah | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | 10 | Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | 11 | Naskah dan Dokumen Izin | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | 12 | Naskah dan Dokumen Izin Kadaluarsa | | | √ | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| | | | 13 | Izin Investasi Strategis Penanaman Modal | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 14 | Perizinan lainnya sesuai jenisnya | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 15 | Pencabutan/Pembatalan/Perbaikan Perizinan Penanaman Modal | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 16 | Administrasi PMPTSP | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 17 | Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 18 | Workshop/Bintek/Diklat PMPTSP | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| 4. | DG | PERDAGANGAN | | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| | DG | 01 | PERDAGANGAN DALAM NEGERI | | | | | | | | |
| | DG | 01 | 01 | Bina Usaha | | | | | | | |
| | | | | 01 | Kelembagaan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Penguatan usaha | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Jasa Perdagangan berbasis elektronik | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | 04 | Jasa Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Usaha dagang asing | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Keagenan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Informasi Pendaftaran perusahaan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Informasi Seksi analisa LKTP | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Pelaku pasar Pengecer | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 10 | Pelaku pasar Pemasok | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | DG | 01 | 02 | Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Iklm usaha | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Bimbingan teknis | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Fasilitasi usaha produktif | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | fasilitasi usaha dan pemasaran | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penelaahan potensi produk dalam rangka pengembangan produk lokal | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Fasilitasi penguatan produk dalam rangka pengembangan potensi produk | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri | | | √ | | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | pencitraan produk dalam negeri | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | 08 | Peningkatan promosi pencitraan produk dalam negeri | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| DG | 01 | 03 | Logistik dan Sarana Distribusi | | | | | | | | |
| | | | 01 | Perencanaan Pengembangan sarana distribusi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Bimbingan teknis Pengembangan sarana distribusi | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Evaluasi pengelolaan sarana distribusi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | kerja sama pengembangan sistem logistik dengan Pemerintah | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 06 | Kerja sama pengembangan sistem logistik dengan lembaga non pemerintah | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Informasi logistik | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Bimbingan teknis penyedia jasa logistik | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 01 | 04 | Bahan Pokok dan Barang Strategis | | | | | | | |
| | | | 01 | Informasi Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Informasi Non Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Hasil Industri berupa gula dan tepung | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Hasil industri berupa minyak goreng dan garam | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|---------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 05 | Barang strategis hasil agro | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Barang strategis hasil industri | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Barang pokok agro serealia | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Barang pokok agro hewan dan non serealia | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 02 | STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | | |
| | DG | 02 | 01 | Standardisasi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Hubungan kelembagaan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Informasi standar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Kerjasama standarisasi regional | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Kerjasama standarisasi bilateral dan multilateral | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penetapan standar | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | | 06 | Perumusan Standar | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Tata Usaha kepegawaian | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Tata usaha keuangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 09 | Tata usaha perencanaan dan program | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 10 | Tata usaha inventaris kantor/BMAN | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 02 | 02 | Pemberdayaan Konsumen | | | | | | | |
| | | | | 01 | Kerjasama | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Informasi, dan publikasi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Konsultasi hukum analisa penyelenggara perlindungan konsumen | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 04 | Analisis penyelenggara perlindungan konsumen | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Bimbingan konsumen | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Bimbingan pelaku usaha | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Fasilitas pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Fasilitas pemberdayaan badan penyelesaian sengketa Konsumen | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 02 | 03 | Pengawasan Barang Beredar dan Jasa | | | | | | | |
| | | | | 01 | Produk pertambangan dan olahan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | | | | 02 | Produk aneka industri | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Produk pertanian dan kehutanan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Produk kimia dan olahan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Jasa distribusi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 06 | Jasa bisnis | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 07 | Kerjasama lembaga pemerintah | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 08 | Kerjasama lembaga non pemerintah | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 02 | 04 | Metrologi | | | | | | | |
| | | | 01 | Sarana metrologi legal | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Kerjasama metrologi legal | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kelembagaan metrologi legal | | | √ | | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | | 04 | Penilaian metrologi legal | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Besaran arus, panjang dan volume | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 09 | Bimbingan Mutu Balai | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------------------|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 10 | Pelayanan Teknis Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 11 | Bimbingan Mutu Balai Pengujian UTTP | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 12 | Pelayanan Teknis Balai Pengujian UTTP | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 03 | PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | | | | | | |
| | DG | 03 | 01 | Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan | | | | | | | |
| | | | 01 | Ekspor produk tanaman pangan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Ekspor produk perikanan, dan peternakan | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Tanaman Perkebunan Tahunan | | | | √ | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| | | | | 04 | Tanaman Perkebunan Musiman | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Hortikultura | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Rempah-rempah dan tanaman obat | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Hasil hutan berupa kayu dan produk kayu | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 08 | Hasil hutan bukan kayu | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 03 | 02 | Ekspor Produk Industri dan Pertambangan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Produk Aneka dan jasa | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Produk Logam dan mesin | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Produk alat transportasi dan elektronika | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Produk industri agro | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Produk kimia | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | 07 | Produk migas | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Produk pertambangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 03 | 03 | Impor | | | | | | | |
| | | | | 01 | Impor Barang Modal Mesin dan peralatan mesin | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Impor Barang Modal alat angkut | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Barang pertanian dan kehutanan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Barang kelautan, dan perikanan | | | √ | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 09 | Barang kimia dan bahan berbahaya | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 10 | Barang tambang dan limbah | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 03 | 04 | Fasilitasi Ekspor dan Impor | | | | | | | |
| | | | | 01 | Kerjasama multilateral dan regional, termasuk bilateral | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pembiayaan perdagangan dalam kerjasama internasional | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 03 | Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Prosedur ekspor dan impor | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Dokumen ekspor dan impor | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Sarana dan prasarana Penunjang Perdagangan Internasional | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 07 | Regulasi Penunjang Perdagangan Internasional | | | √ | | | |
| | | | | 08 | Analisa pelayanan perdagangan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 09 | Fasilitasi pelayanan perdagangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 03 | 05 | Pengamanan Perdagangan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Monitoring Hambatan Perdagangan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Evaluasi Monitoring Hambatan Perdagangan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Penanganan Hambatan Teknis | | | √ | Penentu | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------------------------------------|----|------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | Perdagangan | | | | | kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | pelaksana urusan |
| | | | 04 | Penanganan Tuduhan Dumping | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Penanganan Tuduhan Subsidi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Penanganan Tuduhan Safeguard | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| DG | 04 | KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------|
| | DG | 04 | 01 | Multilateral | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Tarif barang pertanian | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Non Tarif barang pertanian | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Tarif barang non pertanian | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Non Tarif barang non pertanian | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Akses pasar barang non pertanian | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Aturan perdagangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan investasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | 08 | Lingkungan dan isu baru | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Tinjauan Ketentuan perdagangan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 10 | Notifikasi | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 04 | 02 | ASEAN | | | | | | |
| | | | 01 | Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I | | | | | | |
| | | | 02 | Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I | | | | | | |
| | | | 03 | Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II | | | | | | |
| | | | 04 | Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II | | | | | | |
| | | | 05 | ASEAN mitra dialog | | | | | | |
| | | | 06 | Kerjasama antar dan sub regional | | | | | | |
| | DG | 04 | 03 | APEC dan Organisasi Internasional Lainnya | | | | | | |
| | | | 01 | Akses perdagangan Barang APEC | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 02 | Akses investasi APEC | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Fasilitasi perdagangan APEC | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Fasilitasi investasi APEC | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Badan-badan PBB dan Non PBB | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Organisasi komoditi internasional | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | DG | 04 | 04 | Bilateral | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 04 | 05 | Perundingan Perdagangan Jasa | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Jasa bisnis dan distribusi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Jasa keuangan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | | | 04 | Jasa transportasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | 05 | Jasa pendidikan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | 06 | Jasa kesehatan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan | |
| | | | 07 | Jasa komunikasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 08 | Jasa lingkungan dan jasa lainnya | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Rules dan peraturan domestik | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 10 | Penyusunan analisis informasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 05 | PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL | | | | | | | | |
| | DG | 05 | 01 | Pasar dan Informasi Ekspor | | | | | | | |
| | | | 01 | Pengembangan pasar | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pengelolaan data pada sistem informasi ekspor | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 03 | Pengembangan sistem informasi ekspor | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pelayanan pelaku usaha ekspor | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Publikasi informasi ekspor | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 05 | 02 | Produk ekspor dan ekonomi kreatif | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Hasil industri manufaktur berupa Mesin, logam, elektronika dan telematika | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Hasil industri manufaktur berupa Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Produk agro berupa kehutanan dan perkebunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Produk agro berupa pertanian dan perikanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Jasa bisnis dan profesi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | jasa konstruksi dan distribusi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | media dan iptek Ekonomi kreatif | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | merugikan siapapun. | |
| | | | 08 | seni budaya dan desain ekonomi kreatif | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | DG | 05 | 03 | Kerja Sama Pengembangan Ekspor | | | | | | | |
| | | | 01 | Pemerintah luar negeri | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Non pemerintah luar negeri | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pemerintah dalam negeri | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Non pemerintah dalam negeri | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| DG | 05 | 04 | Promosi dan Citra | | | | | | | | |
| | | | 01 | promosi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Perencanaan citra | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pemantauan dan evaluasi citra | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Penerapan citra dalam dan luar negeri | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| DG | 06 | PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | DG | 06 | 01 | Perniagaan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Bina Usaha kelembagaan dan pelaku penunjang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Bina Usaha pelaku pasar | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengawasan Transaksi kelembagaan dan pelaku penunjang | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pengawasan Transaksi pelaku pasar | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pemantauan dan evaluasi keuangan dalam rangka Pengawasan keuangan dan audit | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Audit kepatuhan dan keuangan dalam rangka Pengawasan | | | | √ | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | keuangan dan audit | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| | DG | 06 | 02 | Analisis Pasar | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengkajian pasar fisik dan penyerahan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Posisi dan pelaporan pengkajian pasar | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Kelembagaan dan produk Pengembangan pasar | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Tata tertib dan kontrak pengembangan pasar | | | √ | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------|----|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 04 | Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi pada sistem resi gudang | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual pada Sistem resi gudang | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| DG | 07 | BIMBINGAN TEKNIS | | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| DG | 08 | EVALUASI | | | | | √ | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| 5. | PI | URUSAN PERINDUSTRIAN | | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| | PI | 01 | IKLIM USAHA DAN KERJASAMA | | | | | | | | |
| | PI | 01 | 01 | Industri Manufaktur | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 01 | 02 | Industri Agro | | | | | | | |
| | | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 01 | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | | | | | | | |
| | | | 01 | Alat Transportasi Darat | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------------|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | 03 | Elektronika dan Telematika | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 01 | 04 | Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 02 | PROMOSI INDUSTRI | | | | | | | | |
| | PI | 02 | 01 | Industri Manufaktur | | | | | | | |
| | | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 02 | 02 | Industri Agro | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 02 | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Alat Transportasi Darat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Elektronika dan Telematika | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | 04 | Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan | |
| | PI | 02 | 04 | Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 03 | STANDARISASI DAN TEKNOLOGI | | | | | | | | |
| | PI | 03 | 01 | Industri Manufaktur | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 03 | 02 | Industri Agro | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Hasil Hutan dan | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Perkebunan | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 03 | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | | | | | | | |
| | | | 01 | Alat Transportasi Darat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Elektronika dan Telematika | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 03 | 04 | Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | PI | 04 | HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | | | |
| | PI | 04 | 01 | Industri Manufaktur | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | hukum | dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | PI | 04 | 02 | Industri Agro | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 04 | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Alat Transportasi Darat | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Elektronika dan Telematika | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 04 | 04 | Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | | | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 05 | INDUSTRI HIJAU | | | | | | | | |
| | PI | 05 | 01 | Industri Manufaktur | | | | | | | |
| | | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya) | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka | | | √ | | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | PI | 05 | 02 | Industri Agro | | | | | | | |
| | | | | 01 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 Industri Minuman dan Tembakau | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 05 | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | | | | | | | |
| | | | | 01 Alat Transportasi Darat | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Elektronika dan Telematika | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 05 | 04 | Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| PI | 06 | ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN | | | | | | | | |
| PI | 06 | 01 | Kerjasama Industri Unggulan Kabupaten | | | | | | | |
| | | | 01 | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri I | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri II | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri III | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | PI | 07 | MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA) | | | | | | | | |
| | PI | 07 | 01 | Kerjasama Industri Unggulan Provinsi | | | | | | | |
| | | | 01 | Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri II | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri III | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 07 | 02 | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | 01 | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri I | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 02 | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri II | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri III | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 08 | PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG | | | | | | | | |
| | PI | 08 | 01 | Kawasan Industri Wilayah Industri I | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 08 | 02 | Kawasan Industri Wilayah Industri II | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | PI | 08 | 03 | Kawasan Industri Wilayah Industri III | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 09 | FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI | | | | | | | |
| | PI | 09 | 01 | Kawasan Industri Wilayah Industri I | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 09 | 02 | Kawasan Industri Wilayah Industri II | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 09 | 03 | Kawasan Industri Wilayah Industri III | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal serta penegak hukum | mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | PI | 10 | KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL | | | | | | | | |
| | PI | 10 | 01 | Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral) | | | | | | | |
| | | | | 01 | Akses Industri Wilayah Amerika | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Akses Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Kerjasama Teknik dan Promosi | | | √ | Penentu | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | Industri Wilayah Eropa dan Timus Tengah | | | | | kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Kerjasama Multilateral dengan WTO dan Organisasi Komoditas | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Fora Multilateral lainnya | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 10 | 02 | | Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional | | | | | | | |
| | | | | 01 | Akses Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | 06 | Kerjasama Regional ASEAN dan Mitra Dialog | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 10 | 03 | Ketahanan Industri | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penanganan Hambatan Industri Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral) | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Penanganan Hambatan Industri Wilayah I I(Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Multilateral) | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengamanan Basis Industri Manufaktur | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 04 | Pengamanan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Pengamanan Industri Agro | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pengamanan Industri Kecil dan Menengah | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 11 | STANDARISASI | | | | | | | | |
| | PI | 11 | 01 | Standar | | | | | | | |
| | | | 01 | Standar Industri Manufaktur | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | PI | 11 | 02 | Penyiapan Penerapan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyiapan Penerapan Standar | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Kerja sama Standarisasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 11 | 03 | Infrastruktur Standar | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengembangan Infrastruktur Standar | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 12 | PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI | | | | | | | | | |
| | PI | 12 | 01 | Kebijakan Industri | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Kebijakan Sektoral | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | penegak hukum | pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 02 | Kebijakan Kewilayahan | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 12 | 02 | Perpajakan dan Tarif | | | | | | | |
| | | | 01 | Perpajakan dan Tarif | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Tarif dan Non Tarif | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 12 | 03 | Pengembangan Model Industrial | | | | | | | |
| | | | 01 | Pemrograman Model | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|-----------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 02 | Aplikasi Model | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 13 | PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| | PI | 13 | 01 | Industri Hijau | | | | | | | |
| | | | 01 | Pengembangan Industri Hijau | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Kerja Sama Industri Hijau | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 13 | 02 | Lingkungan Hidup | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | 01 | Lingkungan Global | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pengendalian Lingkungan Hidup | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 13 | 03 | Energi | | | | | | |
| | | | 01 | Konservasi Energi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Diversifikasi Energi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 14 | TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | | |
| | PI | 14 | 01 | Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri | | | | | | |
| | | | 01 | Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Penerapan Kebijakan Teknologi Industri | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | PI | 14 | 02 | Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengkajian Inovasi Teknologi Industri | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Penerapan Inovasi Teknologi Industri | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PI | 14 | 03 | Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| 6. | PW | URUSAN PARIWISATA | | | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| | PW | 01 | PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | | | | | | | | | |
| | PW | 01 | 01 | Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | 01 | Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pengembangan Potensi dan Promosi Investasi Pariwisata | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 01 | 02 | Pengembangan Daya Tarik Wisata | | | | | | | |
| | | | | 01 | Bimtek Daya Tarik Wisata 5 Tahun | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Penilaian Kelayakan Tugas | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Pembantuan | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 05 | Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award) | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 01 | 03 | Industri Pariwisata | | | | | | | |
| | | | 01 | Sarana Pariwisata | | | | | | | |
| | | | | - usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | - penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Jasa Pariwisata | | | | | | | |
| | | | | - jasa transportasi wisata | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | - jasa informasi pariwisata | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | - jasa perjalanan wisata | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | - jasa konsultan pariwisata | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | - jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | - insentif | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | - konvensi, pameran | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pengembangan Produk dan Pelayanan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 01 | 04 | Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata | | | | | | |
| | | | 01 | Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 01 | 05 | Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event | | | | | | |
| | | | 01 | Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pengembangan Rekreasi dan Hiburan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------------|---|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | 03 | Pengembangan Wisata Alam dan Budaya | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| PW | 02 | PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | | | |
| PW | 02 | 01 | Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata | | | | | | | |
| | | | 01 | Informasi Pasar Dalam Negeri | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Informasi Pasar Luar Negeri | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | 03 | Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Perancangan Pemasaran Pariwisata | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 02 | 02 | Promosi Pariwisata Luar Negeri | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Wilayah ASEAN | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Wilayah Asia | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 03 | Wilayah Timur Tengah dan Afrika | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Wilayah Amerika dan Pasifik | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Wilayah Eropa | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 02 | 03 | Promosi Pariwisata Dalam Negeri | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 02 | 04 | Pencitraan Indonesia | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|---|---|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | 01 | Strategi Pencitraan Indonesia (Perencanaan Pencitraan Indonesia, Pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia) | √ | | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang Promosi Media, Sarana dan Distribusi Media | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kerjasama dan Kemitraan Antar lembaga Pemerintah dan non Lembaga Pemerintah | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PW | 02 | 05 | Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus | | | | | | | |
| | | | 01 | Promosi KIE Korporasi | | | | | | | |
| | | | | Korporasi Dalam Negeri | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | Korporasi Luar Negeri | | √ | | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|---|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 03 | Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | EK | 01 | 03 | Pengembangan Seni Rupa | | | | | | | |
| | | | 01 | Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi Kreasi dan Produksi Karya Seni | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | Fasilitasi Pengembangan Seni | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi | | | | | | | |
| | | | | Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | Apresiasi Karya Seni Rupa | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | EK | 02 | EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK | | | | | | | | |
| | EK | 02 | 01 | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media | | | | | | | |
| | | | 01 | Pengembangan Film Animasi dan Komik | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------------------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | | 02 | Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pengembangan Karya Kreatif Periklanan iklan cetak dan elektronik | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | EK | 02 | 02 | Desain dan Arsitektur | | | | | | | |
| | | | | 01 | Arsitektur dan Desain Interior | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Komunikasi Visual | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Desain Produk dan Kemasan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Mode | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | EK | 02 | 03 | Kerjasama dan Fasilitas | | | | | | | |
| | | | | 01 | Lisensi Teknologi, pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan | |
| | EK | 03 | 02 | Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Program dan Evaluasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Data dan Publikasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | EK | 03 | 03 | Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Program dan Evaluasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Penyelenggaraan dan Kerjasama | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | EK | 03 | 04 | Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Program dan Evaluasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Evaluasi dan Kerjasama | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| 8. | PB | PENANGGULANGAN BENCANA | | | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| | PB | 01 | PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | | | | | | | | | |
| | PB | 01 | 01 | Pengurangan Resiko Bencana | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 01 | Pencegahan Pengkajian Resiko | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pencegahan Pengelolaan Resiko | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Mitigasi Struktur | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Mitigasi Non Struktur | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 01 | 02 | Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | |
| | | | 01 | Peran Lembaga Usaha Padat Modal | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Peran Lembaga Usaha Padat Karya | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Peran Organisasi Internasional | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Peran Organisasi Sosial Masyarakat Nasional | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Peran Peningkatan Kesadaran Masyarakat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Peran Peningkatan Ketahanan Masyarakat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | merugikan siapapun. | | |
| | PB | 01 | 03 | Kesiapsiagaan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Peringatan Pemaduan Sistem Jaringan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pemantauan dan Peringatan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Perencanaan Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Perencanaan Penerapan Rencana Strategis | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Penyiapan Pengendalian Sumber Daya | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 02 | PENANGANAN DARURAT | | | | | | | | | |
| | PB | 02 | 01 | Tanggap Darurat | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Perencanaan Pendataan Darurat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Perencanaan Operasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengendalian Pengorganisasian | | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Pos Komando | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | 04 | Pengendalian Sarana dan Prasarana | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Penyelamatan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Evakuasi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 02 | 02 | Bantuan Darurat | | | | | | | |
| | | | 01 | Bantuan Sandang | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Bantuan Pangan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Bantuan Kesehatan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Bantuan Air Bersih | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Bantuan Pembangunan Hunian Sementara | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Bantuan Pendukung Hunian Sementara | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | PB | 02 | 03 | Perbaikan Darurat | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyiapan Peralatan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Angkutan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Perbaikan Prasarana Sosial | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Perbaikan Prasarana Ekonomi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pemantauan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Pelaporan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 03 | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | | | | | | | | | |
| | PB | 03 | 01 | Penilaian Kerusakan | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Inventarisasi Kerusakan Fisik | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Inventarisasi Kerusakan Sosial Ekonomi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Estimasi Pembiayaan Pembangunan | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|--|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan | |
| | | | | 04 | Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 03 | 02 | Pemulihan dan Peningkatan Fisik | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Rehabilitasi Fasilitas Umum | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Rekonstruksi Fasilitas Umum | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Rehabilitasi Fasilitas Sosial | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Rekonstruksi Fasilitas Sosial | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Berat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Ringan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 03 | 03 | Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan | | | | √ | Pengguna internal dan | Apabila diketahui oleh publik tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal | merugikan siapapun. | urusan |
| | | | 03 | Pemulihan Ekonomi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Peningkatan Ekonomi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 03 | 04 | Penanganan Pengungsi | | | | | | | |
| | | | 01 | Perlindungan Pengungsi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Pemberdayaan Pengungsi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Kompensasi Pengungsi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Pengembalian Hak Pengungsi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Pemulangan dan Repatriasi Pengungsi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Relokasi/Pengalihan Pengungsi | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 04 | LOGISTIK DAN PERALATAN | | | | | | | | |
| | PB | 04 | 01 | Logistik | | | | | | | |
| | | | 01 | Inventarisasi Analisis Kebutuhan | | | | √ | Pengguna | Apabila diketahui oleh | Unit |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | internal dan eksternal | publik tidak merugikan siapapun. | pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Inventarisasi Pengadaan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Penyimpanan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Distribusi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | PB | 04 | 02 | Peralatan | | | | | | | |
| | | | | 01 | Inventarisasi Analisis Kebutuhan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Inventarisasi Pengadaan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Penyimpanan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pemeliharaan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Pengerahan | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Distribusi | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| 9. | KI | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | SR | R | T | B | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|----|----------------------------|---|--|----|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | KI | 01 | SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |
| | KI | 01 | 01 | Penataan Sumber Daya | | | | | | | |
| | | | 01 | Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Penataan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 03 | Alokasi Dinas Bergerak Darat | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | pemerintahan. | |
| | | | | 05 | Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Pengelolaan Orbit Satelit Notifikasi dan Penataan Filing Satelit | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Pengelolaan Orbit Satelit Tata Kelola Hubungan Antar penyelenggara | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Ekonomi Sumber Daya Analisa Industri dan Ekonomi | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 09 | Ekonomi Sumber Daya Penanganan Izin Pita | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 10 | Harmonisasi Teknik Spektrum Teknik Spektrum Antar lembaga | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 11 | Harmonisasi Teknik Spektrum Harmonisasi dan Notifikasi | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | KI | 01 | 02 | Operasi Sumber Daya | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Tetap | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | 05 | Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpendinguduk | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Operator Radio | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Penanganan Biaya Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Penanganan Biaya Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 09 | Konsultasi Dan Informasi Data Operasi Sumber Daya | | | √ | | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| | | | | 10 | Konsultasi Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | KI | 01 | 03 | Pengendalian Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum | | | √ | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Rancang | | | √ | Penentu kebijakan, | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak | Unit pelaksana |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum | | | | | pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | urusan |
| | | | | 04 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 08 | Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 09 | Monitoring Frekuensi Radio | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | KI | 01 | 04 | Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika | | | | | | | |
| | | | 01 | Teknik Pos dan Telekomunikasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 02 | Teknik Komunikasi Radio | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan | Unit pelaksana urusan |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | eksternal serta penegak hukum | terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | |
| | | | 03 | Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 04 | Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 05 | Standar dan Audit Perangkat Lunak | | | √ | | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Unit pelaksana urusan |
| | | | 06 | Pengujian Perangkat Telekomunikasi | | | √ | | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | KI | 02 | PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |

| | KI | 02 | 01 | Pos | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 01 | Layanan Pos Universal | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 02 | Penerapan Layanan Pos Universal | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 03 | Layanan Pos Komersial Tata Kelola Layanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 04 | Layanan Pos Komersial Data dan Informasi Layanan | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 05 | Prangko | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 06 | Filateli | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 07 | Iklim Usaha Pos Universal | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 08 | Iklim Usaha Pos Komersial | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 09 | Pentarifan Pos Layanan Pos Universal | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |
| | | | | 10 | Pentarifan Pos Komersial | | | | √ | Pengguna internal dan eksternal | Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. | Unit pelaksana urusan |